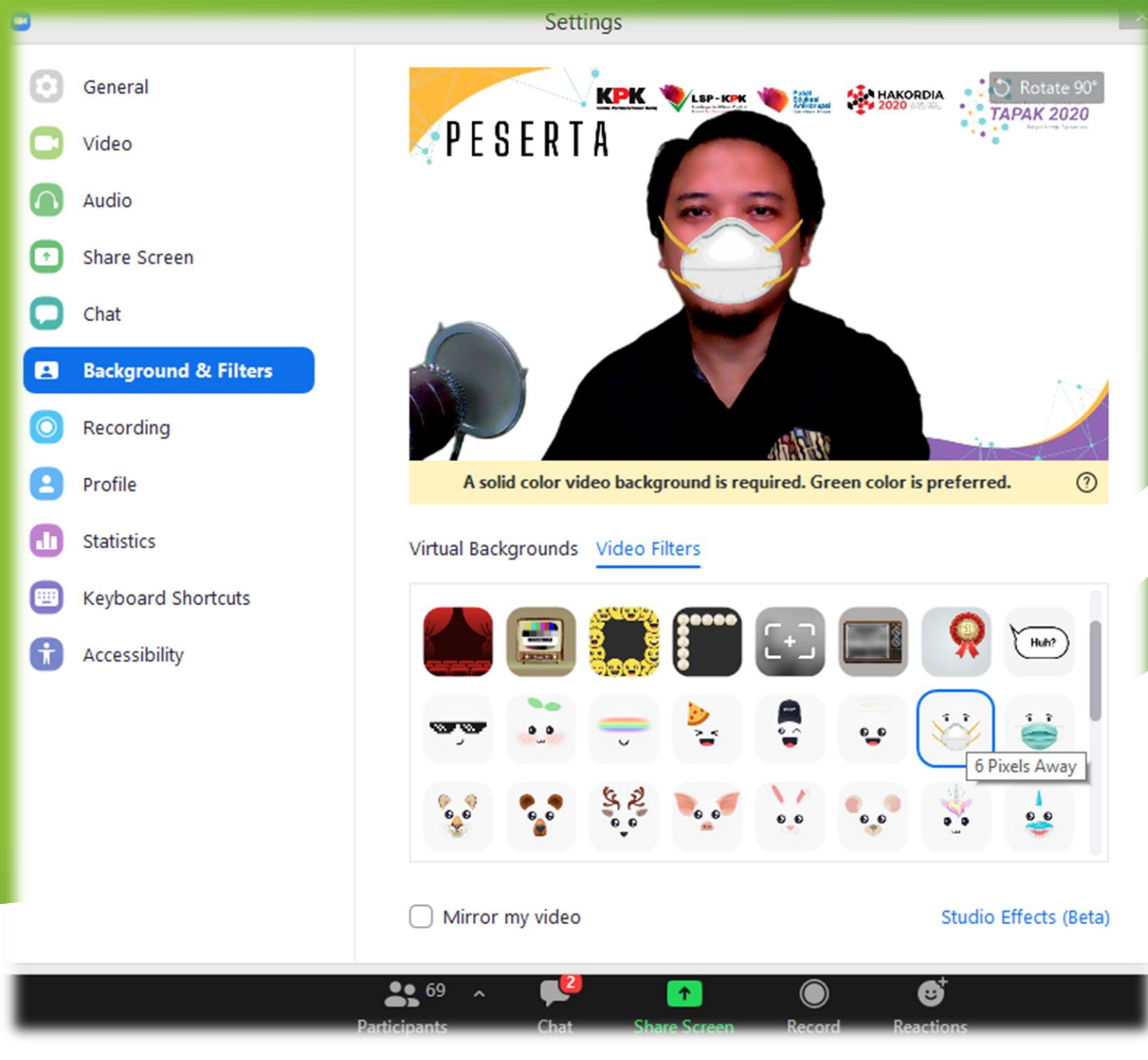
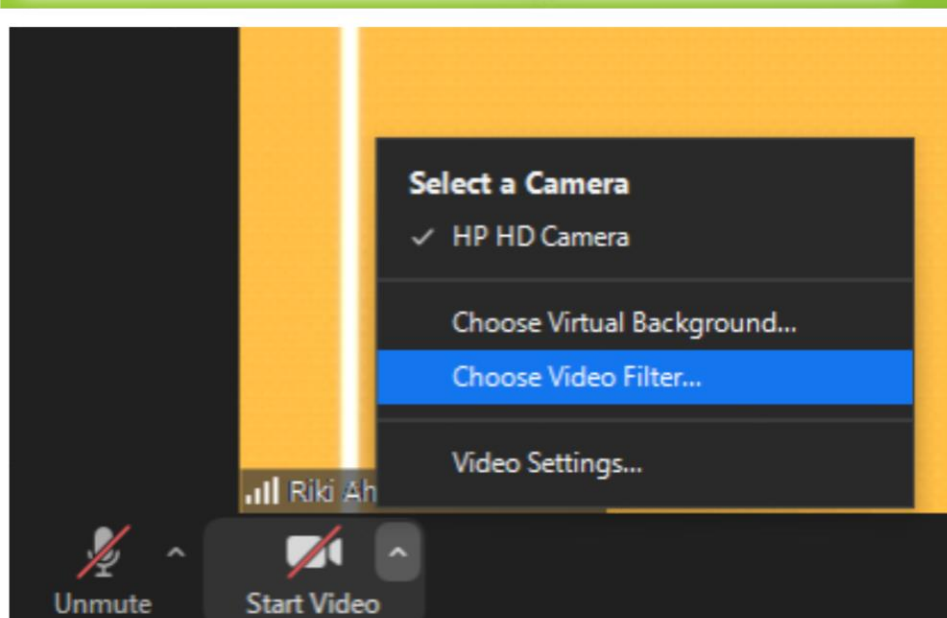




SINERGI PENYULUH ANTIKORUPSI DALAM PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI

Disampaikan dalam acara Temu Aksi Penyuluh Anti Korupsi (TAPAK) 2020

Niken Ariati (Kasatgas Korwil V)





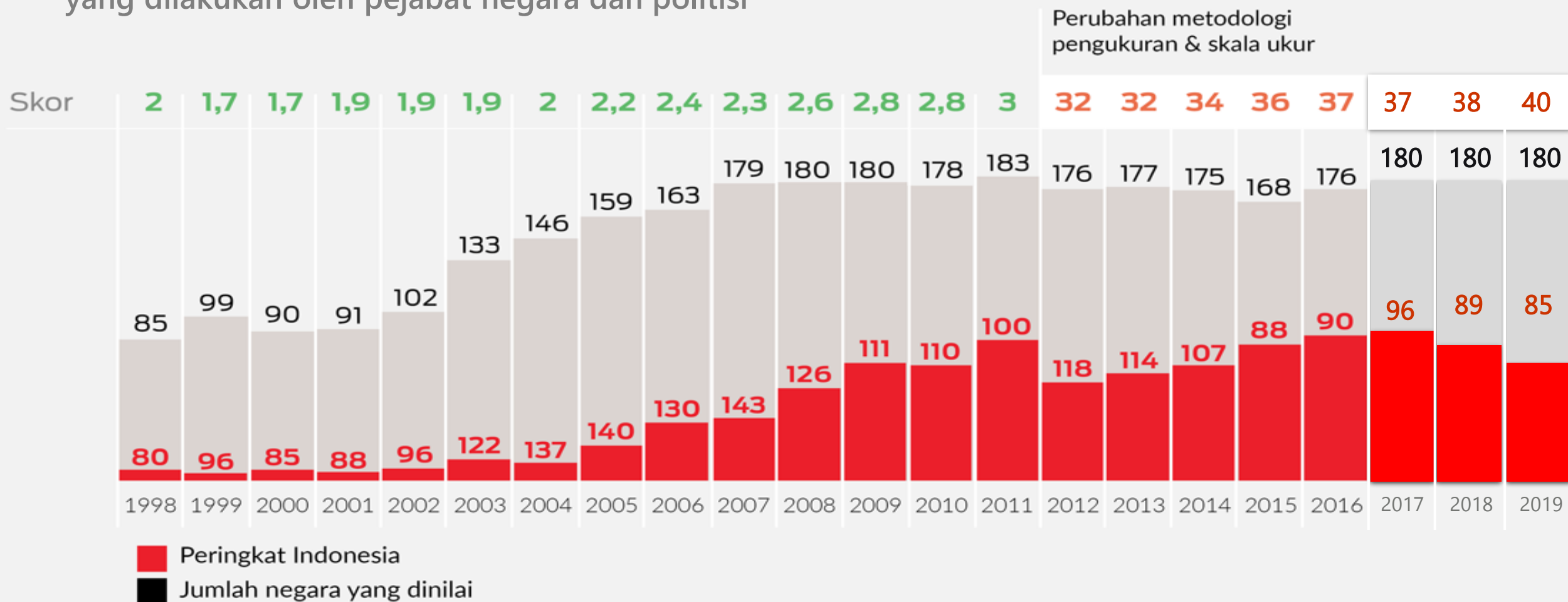
SINERGI PENYULUH ANTIKORUPSI DALAM PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI

Disampaikan dalam acara :
Temu Aksi Penyuluh Anti Korupsi (TAPAK) 2020

NIKEN ARIATI
Kasatgas Pencegahan
KORWIL V KPK RI

Indeks Persepsi Korupsi

Mengukur persepsi korupsi secara global di sektor publik yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi



Sumber: Transparansi Internasional

KASUS
KORUPSI
DALAM ANGKA

“DARI 1 075 TOTAL PERKARA, SUAP / PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENJADI MAYORITAS*”

**sumber: acch.kpk.go.id/ 1 Juni 2020*

224

Perkara terkait
Pengadaan Barang/Jasa

23

Perkara terkait
Perijinan

708

Perkara terkait
Penyuapan

26

Perkara terkait
Pungutan

48

Perkara terkait
Penyalahgunaan Anggaran

36

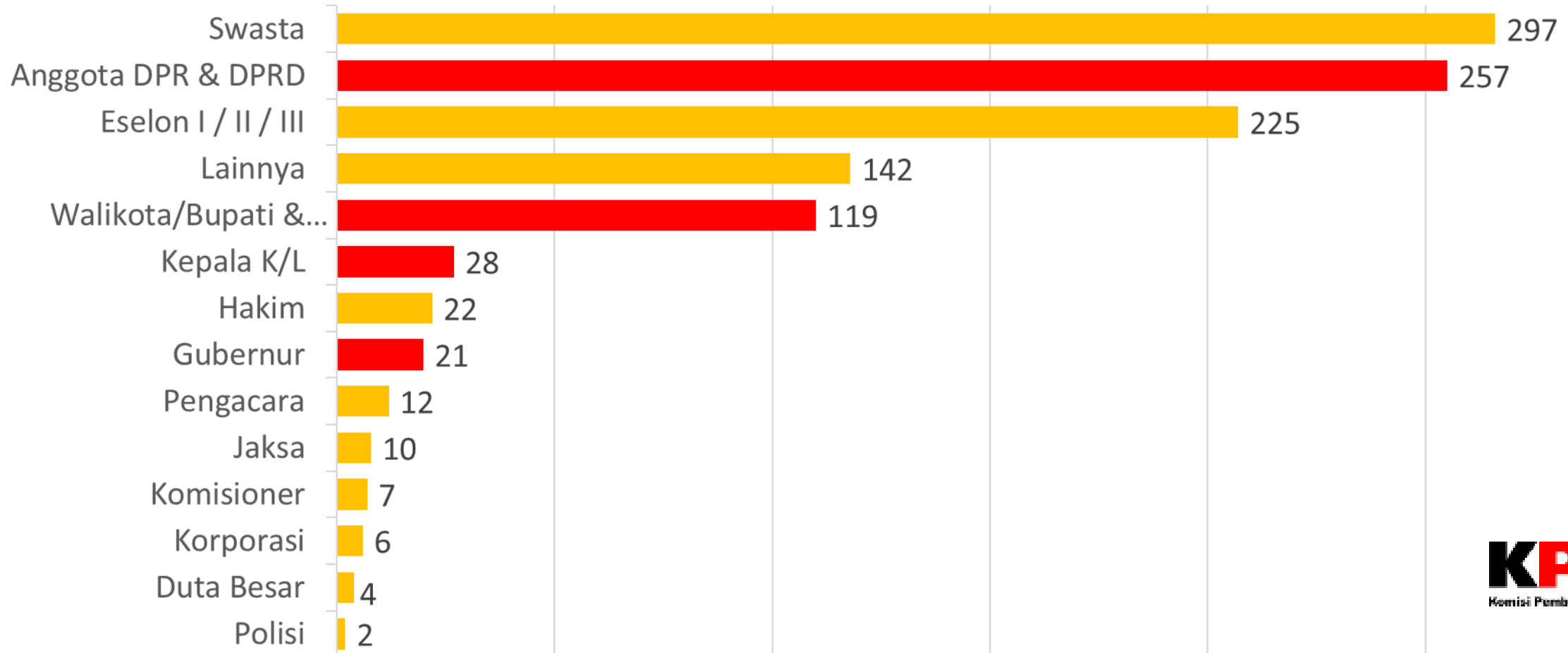
Perkara terkait
TPPU

10

Perkara terkait
Merintangi Proses KPK

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkara KPK berdasarkan Jenis Profesi/Jabatan Tahun 2004 – Mei 2020



27 dari 34 PROVINSI Terjadi Kasus KORUPSI 2004 - 2020

yang ditangani KPK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

BERANI
JUJUR
HEBAT!



Sumber: Data Penindakan KPK, Mei 2020

MALUKU
6 KASUS

NTB
12 KASUS

NTT
5 KASUS

PAPUA
22 KASUS

KALBAR
10 KASUS

KALTIM
22 KASUS

SULUT
10 KASUS

SULSEL
5 KASUS

SULTENG
5 KASUS

SULTRA
8 KASUS

DKI Jakarta
61 KASUS

BANTEN
24 KASUS

JABAR
101 KASUS

JATENG
49 KASUS

JATIM
93 KASUS

BALI
5 KASUS

KALSEL
10 KASUS

KALTENG
5 KASUS

NAD
14 KASUS

SUMUT
73 KASUS

SUMSEL
24 KASUS

SUMBAR
3 KASUS

JAMBI
12 KASUS

RIAU & KEP
64 KASUS

BENGKULU
22 KASUS

LAMPUNG
30 KASUS





MODUS KORUPSI KEPALA DAERAH



Intervensi dalam Belanja Daerah

(PBJ, pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah / bansos / program, pengelolaan aset, penempatan anggaran pemda di BUMD, dll)



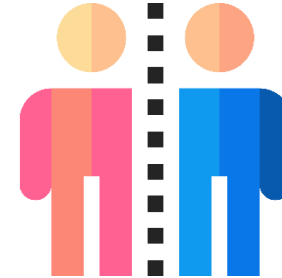
Intervensi dalam Penerimaan Daerah

(Pajak daerah/retribusi, pendapatan daerah dari pusat, kerjasama dengan pihak lain)



Perizinan

(Rekomendasi, penerbitan perizinan, pemerasan)



Benturan Kepentingan

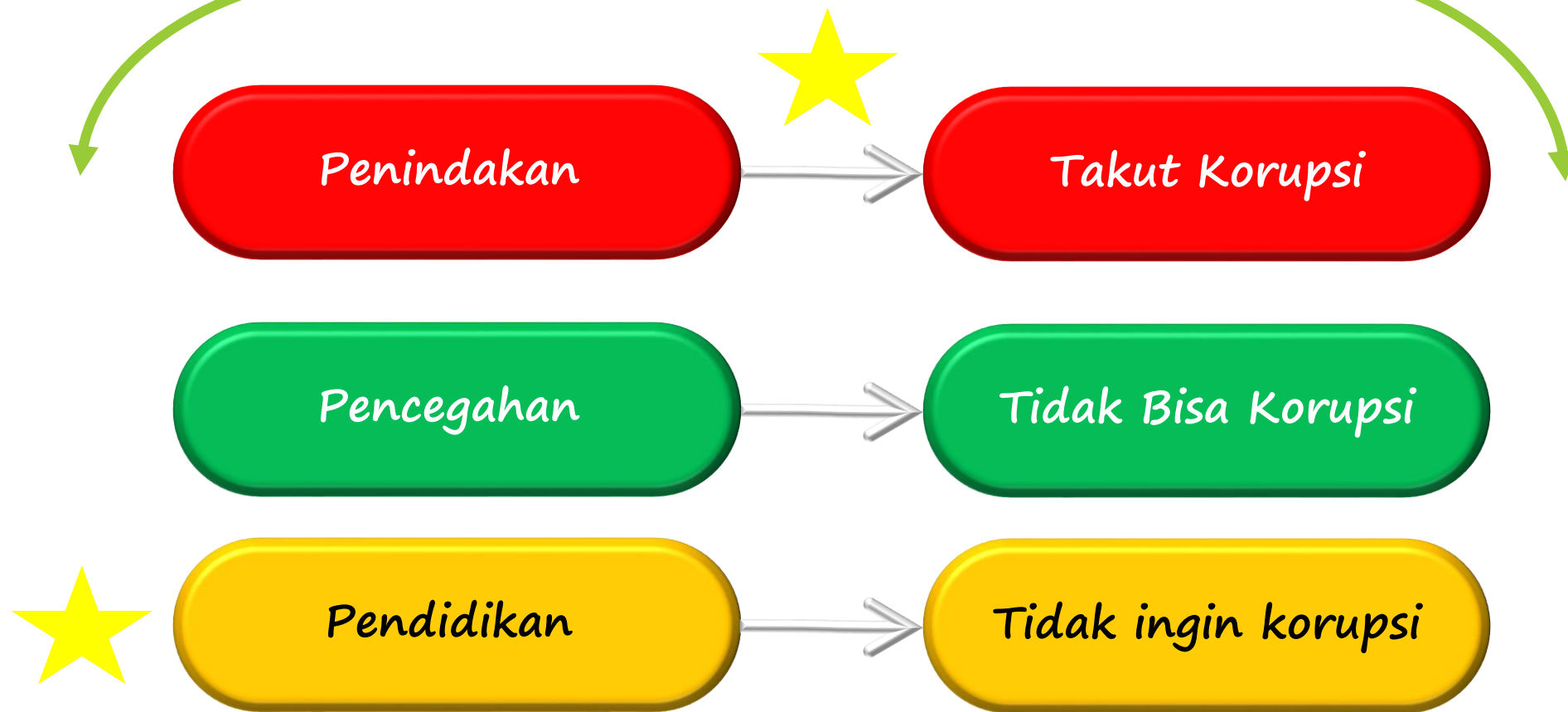
(Dalam proses PBJ, rotasi/mutasi, rangkap jabatan, dll)



Penyalahgunaan Wewenang

(Pengangkatan dan penempatan jabatan pada orang dekat, pemerasan pada rotasi, mutasi, promosi, gratifikasi yang dilarang, dll)

Komitmen Politik



✓ Kecukupan hukum

✓ Kecukupan Sumber Daya

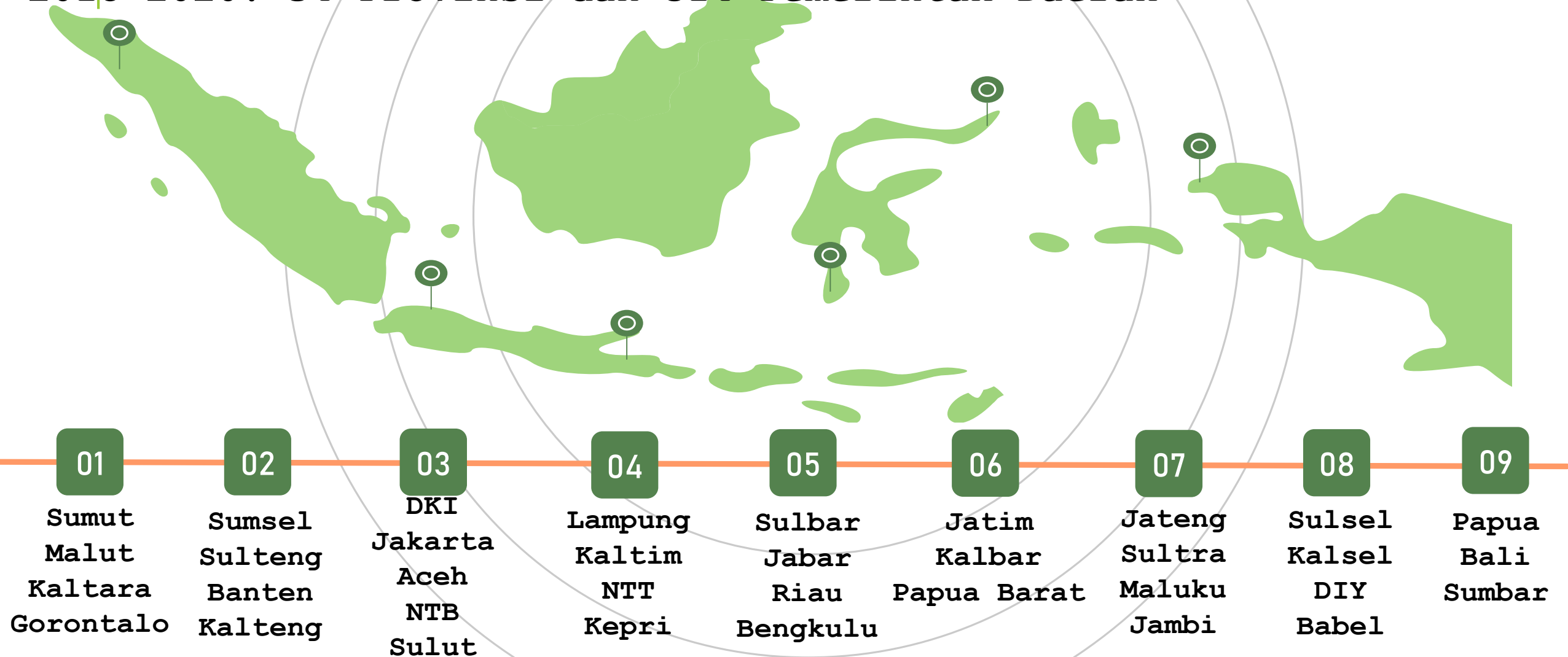
✓ Peran Serta Masyarakat

PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI DI PEMERINTAH DAERAH



LOKUS KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI

2018-2020: 34 Provinsi dan 514 Pemerintah Daerah



MONITORING CENTRE FOR PREVENTION (MCP) UNTUK PERBAIKAN TATA KELOLA



Dalam rangka membangun tata kelola Pemda secara Komprehensif, KPK fokus melakukan pencegahan terintegrasi dengan membangun perbaikan di 8 focus area yang dikenal dengan **MCP**

MCP dinilai berdasarkan *Self Assessment* dari Pemda, yang kemudian diverifikasi dan diuji validitas pelaporannya oleh KPK.

Nilai akhir **Upaya pencegahan Korupsi Pemda** adalah hasil verifikasi KPK atas self assessment Pemda yang dihitung dengan memperhatikan masing-masing bobot indikator MCP

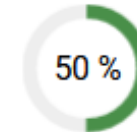
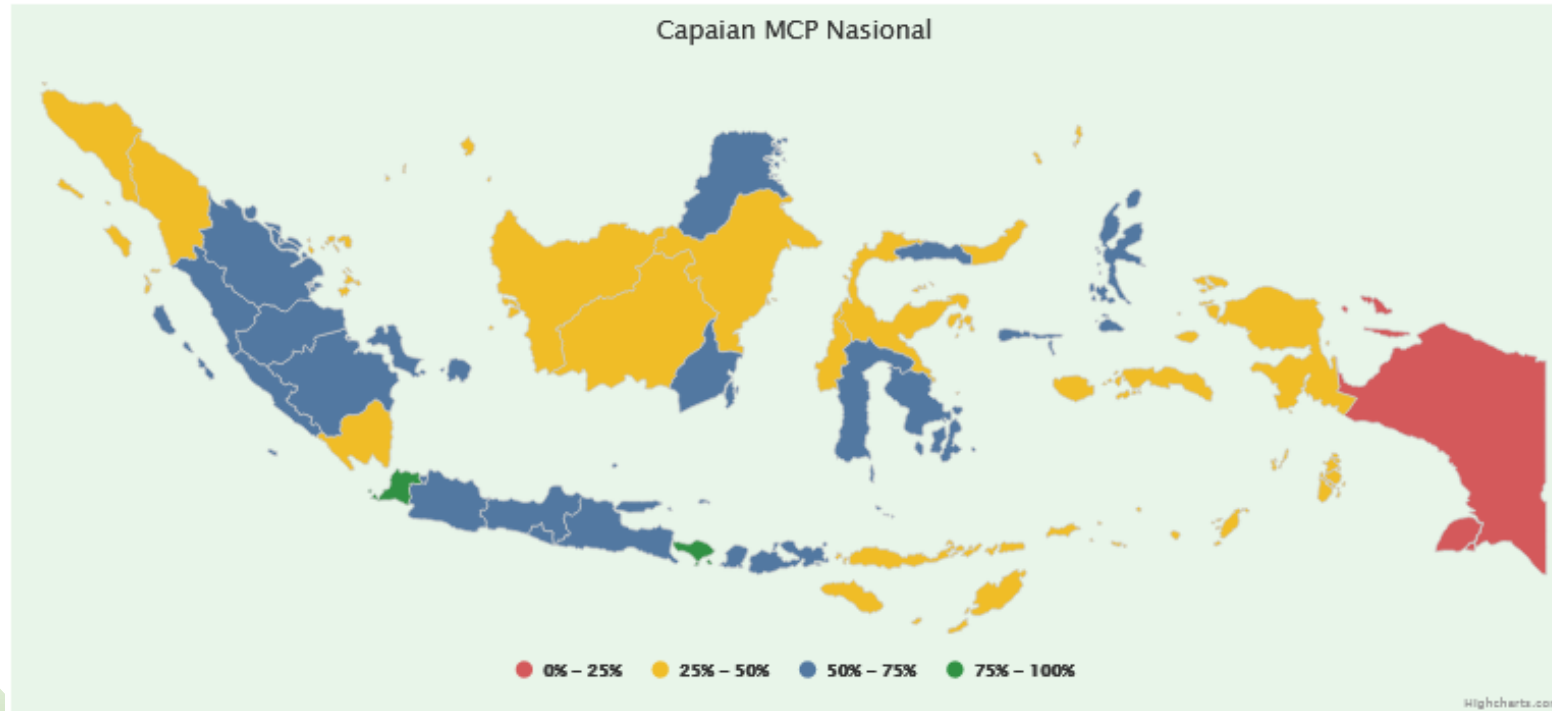
Penilaian **MCP** dilakukan terhadap **SELURUH** Pemda di Indonesia sejak 2018, dengan masa penilaian dimulai sejak Januari s/d 31 Desember

CAPAIAN MCP NASIONAL 2020

UPDATE DATA 14 DES 2020 (SUMBER: JAGA.ID)

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

BERANI
NJUR!
HEBAT!



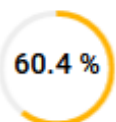
Cari instansi

No ↑	Instansi	Total
1	Pemerintah Kabupaten Badung	87.75
2	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	87.59
3	Pemerintah Kabupaten Tangerang	86.49
4	Pemerintah Provinsi Banten	86.44
5	Pemerintah Provinsi Bali	85.96
6	Pemerintah Kabupaten Lamongan	85.89
7	Pemerintah Kota Denpasar	85.70
8	Pemerintah Kabupaten Boyolali	85.63
9	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	84.88
10	Pemerintah Kabupaten Lebak	84.02

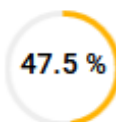
Records per page: 10 1-10 of 543

Progres Keberhasilan Nasional

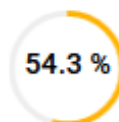
Perencanaan dan
Penganggaran APBD



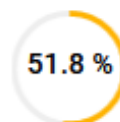
Pengadaan Barang dan Jasa



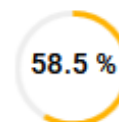
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



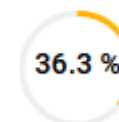
APIP



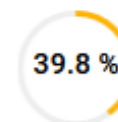
Manajemen ASN



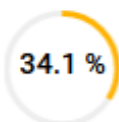
Optimalisasi Pajak Daerah



Manajemen Aset Daerah



Tata Kelola Dana Desa





58%

PROGRES RENAKSI KORSUPGAH NASIONAL

Dashboard ini memberikan informasi Progres Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di **TINGKAT NASIONAL** yang dilakukan pada **8 Area Intervensi** tahun **2018**. Progres Korsupgah ini merupakan akumulasi progres Area Intervensi dikali masing-masing bobot.



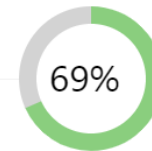
542 PEMERINTAH DAERAH

PILIH

Pemerintah Daerah

NO	PEMERINTAH DAERAH	
1	PEMKAB LAMONGAN	93%
2	PEMKAB PURWOREJO	93%
3	PEMKOT SURABAYA	93%
4	PEMKAB BOYOLALI	92%
5	PEMPROV LAMPUNG	92%
6	PEMKAB INDRAGIRI HILIR	90%
7	PEMKOT PADANG PANJANG	90%
8	PEMPROV JAWA TENGAH	89%
9	PEMKOT SAWAH LUNTO	88%

Rerata MCP meningkat setiap tahunnya dari 58% di 2018, menjadi 69% di 2019



PROGRES RENAKSI KORSUPGAH NASIONAL

Dashboard ini memberikan informasi Progres Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di **TINGKAT NASIONAL** yang dilakukan pada **8 Area Intervensi** pada tahun **2019**. Progres Korsupgah ini merupakan akumulasi progres Area Intervensi dikali masing-masing bobot.

WILAYAH PROVINSI
(All)

PEMERINTAH DAERAH
(All)



542 PEMERINTAH DAERAH

Pilih

Pemerintah Daerah

No	PEMERINTAH DAERAH	
1	PEMKAB BOYOLALI	97%
2	PEMKAB LAMONGAN	97%
3	PEMPROV JAWA TENGAH	96%
4	PEMKAB PURWOREJO	95%
5	PEMKAB MUSI BANYUASIN	95%
6	PEMKAB TANGERANG	94%
7	PEMKAB MUSI RAWAS	94%
8	PEMKOT BANDUNG	94%

MCP terpantau secara online melalui aplikasi JAGA.ID

1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

06

Penganggaran APBD (15%)

- Aplikasi Penganggaran APBD (50%)
- Penyerahan APBD (20%)
- Persetujuan APBD (10%)
- Publikasi APBD (20%)

04

Standar Satuan Harga (SSH) – 10%

- Penetapan SSH (20%)
- Implementasi SSH (30%)
- Reviu SSH (30%)
- Tindak Lanjut Reviu SSH (20%)

02 Dokumentasi RPJMD (15%)

- Menu RPJMD (30%)
- Implementasi Menu RPJMD (20%)
- Reviu RKPD (25%)
- Tindak Lanjut Reviu RKPD (25%)

06

07

Integrasi Perencanaan & Penganggaran APBD (15%)

Integrasi aplikasi perencanaan dan penganggaran APBD (0-100%)

Analisis Standar Biaya (ASB) – 10%

- Penetapan ASB dan HSPK (50%)
- Kesesuaian SSH dan ASB/ HSPK dan Implementasi ASB (20%)
- Reviu ASB dan HSPK (20%)
- Tindak Lanjut Reviu ASB dan HSPK (10%)

Dok Musrenbang, Pokir DPRD, Forum Perangkat Daerah (15%)

- Dokumentasi Musrenbang (40%)
- Dokumentasi Pokir DPRD (40%)
- Dokumentasi Forum Perangkat Daerah (20%)

Aplikasi Perencanaan (20%)

- Aplikasi Perencanaan APBD (50%)
- Implementasi Perencanaan APBD (50%)

07

05

03

01

2. PENGADAAN BARANG DAN JASA

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR

1 UKPBJ Struktural & Pokja Permanen (25%)

- UKPBJ Struktural (25%)
- Pokja Permanen (25%)
- Ketersediaan SDM UKPBJ (15%)
- Ketersediaan Fungsional PBJ (35%)

2 Pelaksanaan Tupoksi (25%)

- Reviu Perencanaan PBJ (20%)
- Reviu HPS (20%)
- Pengecekan Kualifikasi Vendor (10%)
- Database Vendor (20%)
- Evaluasi Kegiatan PBJ (20%)
- Advokasi PBJ (10%)

3 Perangkat Pendukung (15%)

- Kode Etik (30%)
- SOP (40%)
- TPP Khusus UKPBJ (30%)

4 Penayangan SIRUP (15%)

- % Penayangan SIRUP (60%)
- Integrasi Aplikasi Penganggaran APBD dengan SIRUP (40%)

5 Pengendalian & Pengawasan (20%)

- Audit Kepatuhan PBJ (50%)
- TL Hasil Audit Kepatuhan PBJ (40%)
- Audit IT PBJ (10%)

3. APIP

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR

1

Kecukupan & Kompetensi APIP (20%)

- Kecukupan APIP (40%)
- Pelatihan APIP (10%)
- APIP Bersertifikat (50%)

3

Probity Audit (20%)

Laporan Hasil Probity Audit
(5 Laporan)
0 – 100%

5

TL Hasil Pemeriksaan (20%)

- Internal (50%)
- Eksternal (50%)



1



2



3



4



5

Ketersediaan Anggaran (20%)

- Kesesuaian dengan Regulasi (60%)
- Efektivitas Anggaran (40%)

Pemeriksaan Khusus (20%)

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
(5 Laporan)
0 – 100%



2

4

PERIZINAN

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR

01

REGULASI (25%)

- Perda RTRW/ RDTR (30%)
- SK Kada SOP Perizinan (10%)
- Perkada Pendelegasian Kewenangan perizinan (20%)
- SK Kada Kode Etik (10%)
- Perkada KSWP (20%)
- SK Kada Tim Teknis (10%)

02

INFRASTRUKTUR (10%)

- Sistem Perizinan Online (40%)
- Lokasi dan Tempat Layanan (30%)
- Media Publikasi (30%)

03

PROSES PERIZINAN (40%)

- Pendelegasian Kewenangan (20%)
- Tracking System (10%)
- Rekomendasi Teknis (20%)
- E-Signature (10%)
- Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (30%)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (10%)



04

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (25%)

- Penanganan Pengaduan (30%)
- Audit Kepatuhan (70%)



MANAJEMEN ASN

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR

Evaluasi Jabatan 25%

1

- Evaluasi Jabatan (70%)
- Perkada ANJAB ABK (30%)

Penilaian Kinerja 25%

2

- Aplikasi Penilaian Kinerja (50%)
- Tambahan Penghasilan Pegawai (50%)

Kepatuhan LHKPN & Pengendalian Gratifikasi 20%

3

- Kepatuhan LHKPN (50%)
- Pengendalian Gratifikasi (50%)

Pola Rekrutmen, Promosi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN (20%)

4

- Laporan BKD kepada Kepala Daerah (60%)
- Audit Kepegawaian (40%)

Benturan Kepentingan 10%

5

- Regulasi Benturan Kepentingan (50%)
- Evaluasi Benturan Kepentingan (50%)

OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR

01. Database

Pajak (20%)

- Data Potensi Pajak (50%)
- Data Tunggakan Pajak (50%)

01



02



02. Inovasi

Peningkatan Pajak (20%)

- Usulan Inovasi (50%)
- Capaian Hasil Inovasi (50%)

03. Penagihan

Piutang Pajak (30%)

- Laporan Penagihan Piutang Pajak (30%)
- Capaian Penagihan Piutang Pajak (70%)



03



04



04. Peningkatan Pajak (30%)

- Peningkatan Mata Pajak yang Diintervensi (50%)
- Peningkatan Total Pajak (50%)



MANAJEMEN ASET DAERAH

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR



Database Aset (10%)

- Aplikasi penatausahaan aset (20%)
- Rekonsiliasi (40%)
- Database Aset (40%)



Pengelolaan Aset (30%)

- Regulasi (60%)
- Pengawasan (40%)



Sertifikasi Aset (30%)



- Laporan Sertifikasi Aset (30%)
- % Sertifikasi Aset (70%)



Penertiban dan Pemulihan Aset (30%)



- Penertiban Aset (50%)
- Pemulihan Aset (50%)



TATA KELOLA DANA DESA

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR



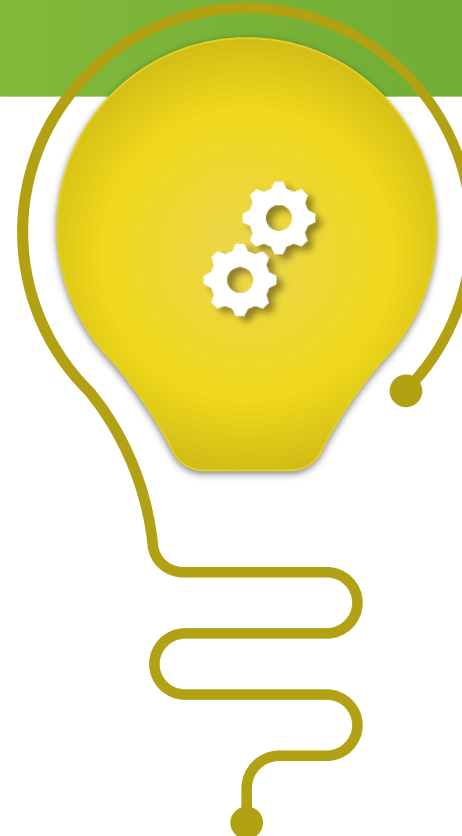
Publikasi Dana Desa (20%)

- Publikasi APBDes (50%)
- Publikasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (50%)



Implementasi SISKEUDES (20%)

- Implementasi SISKEUDES (30%)
- Laporan Keuangan melalui SISKEUDES (35%)
- RAPBDes melalui SISKEUDES (35%)



Implementasi SISWASKEUDES (10%)

Implementasi SISWASKEUDES (0-100%)



Pengawasan (50%)

- Perkada Tata Kelola Dana Desa (10%)
- Pelaporan kepada Dinas Pendes (30%)
- Pelaporan kepada Inspektorat (30%)
- Audit Dana Desa (30%)

FOKUS DAN PROGRAM TEMATIK 2020



Penanganan Covid-19

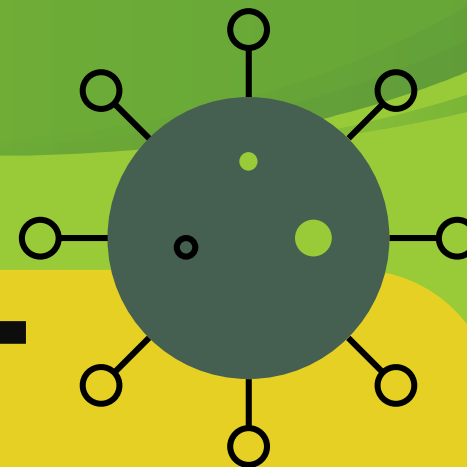
Penyelamatan
Keuangan dan Aset
Derah

Penyempurnaan 8
Program Intervensi



REALOKASI ANGGARAN COVID-19 PEMERINTAH DAERAH

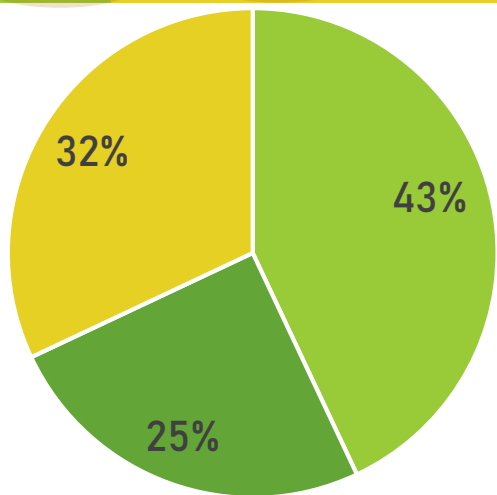
RP 67.84 T



Total *Refocusing*/Realokasi Anggaran
pada Pemerintah Daerah

Sumber: Kemendagri 3 Juni 2020

Data terus bergerak hingga penetapan APBD-P



■ Kesehatan ■ Ekonomi ■ JPS

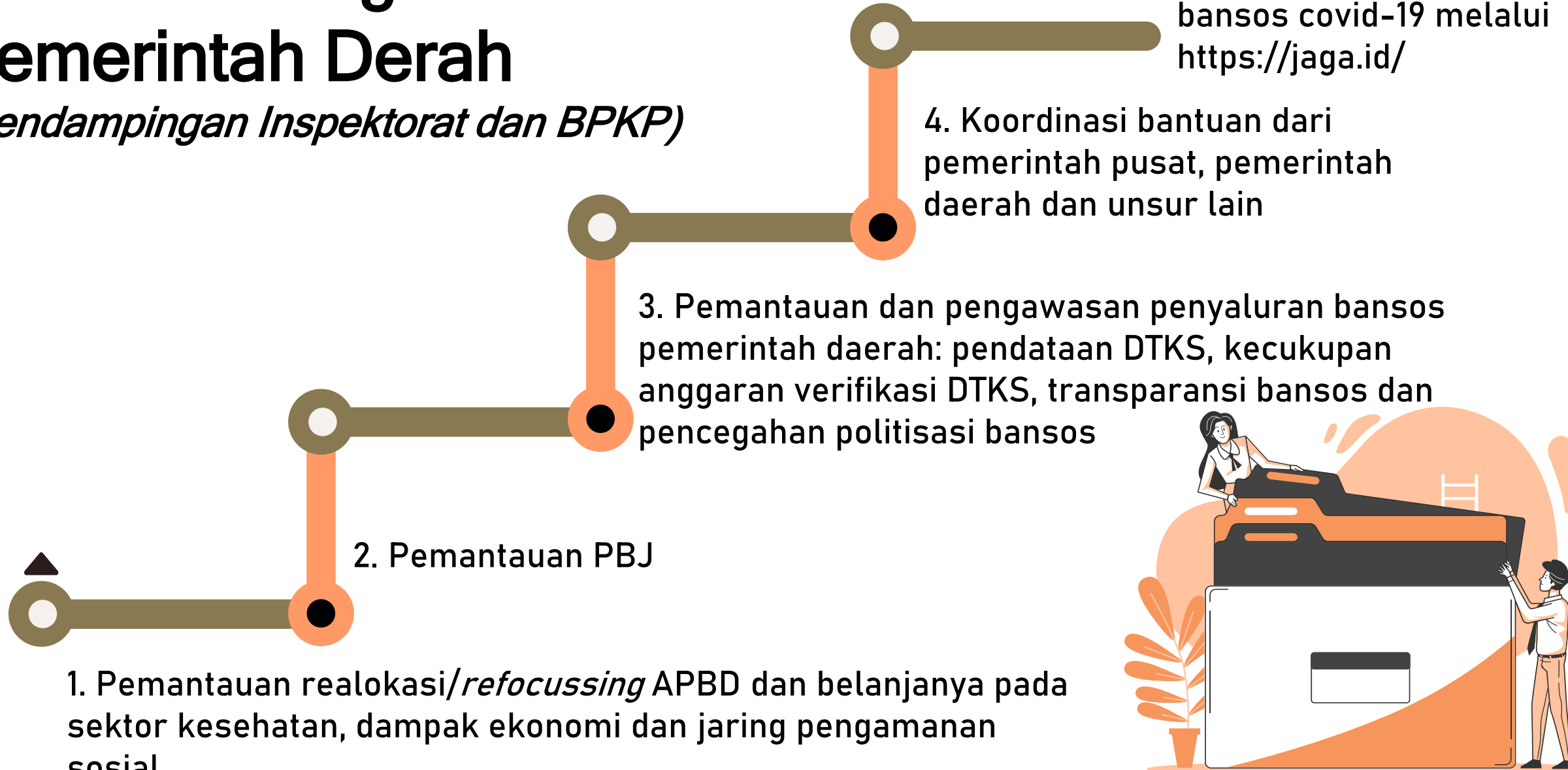
Penanganan Kesehatan 28.93 T

Penanganan Dampak Ekonomi 17.16 T

Jaringan Pengaman Sosial 21.71 T

Program **KPK** dalam Penanganan Covid-19 di Pemerintah Daerah

(Pendampingan Inspektorat dan BPKP)



MEMBANGUN APLIKASI JAGA

JAGA BANSOS

Fitur baru dalam JAGA – Platform Pencegahan Korupsi untuk:

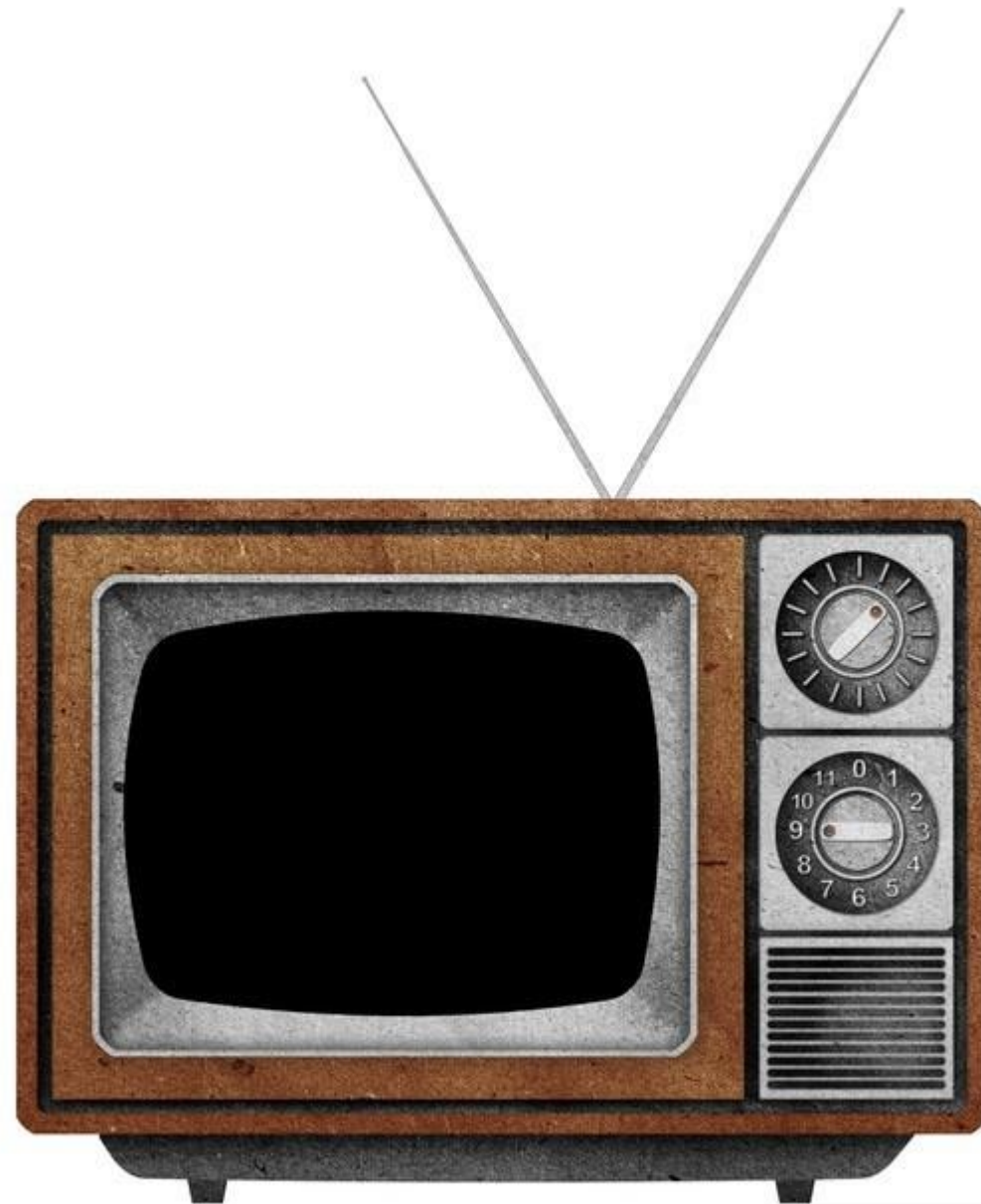
1. Sampaikan laporan dugaan penyimpangan/penyelewengan BANSOS
2. Mencari tahu segala hal terkait BANSOS
3. Diskusi dengan masyarakat terkait BANSOS
(*success/failed story*)

Dapat digunakan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja



Website <https://jaga.id>







Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID) adalah situs resmi platform JAGA dan portal informasi publik mengenai Pencegahan Korupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna mendorong Partisipasi, Akuntabilitas, Respon, dan Transparansi dari Pemerintah dan Masyarakat. Data yang ada bersumber dari Kementerian dan Lembaga terkait.

SELENGKAPNYA ▼



Login 

 Login dengan Facebook

 Login dengan Google

 Login dengan Twitter

- atau -

Email



Password



LOGIN

Lupa kata sandi? **Bantuan**

Belum memiliki akun? **Daftar**

Untuk memulai, login terlebih dahulu, masukkan username dan password

OUTPUT PENYELAMATAN ASET & KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019



PAJAK PROVINSI (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR & PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR)
MENINGKAT RP. 3.7 T



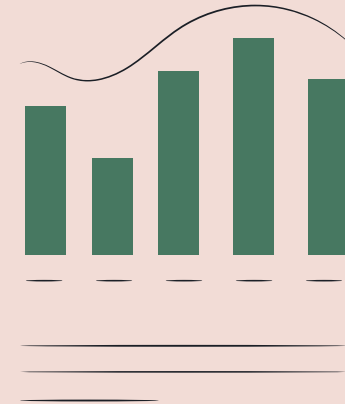
PENERTIBAN ASET (PERSONIL-PENDANAAN-SARPRAS DAN DOKUMEN/P3D, PEMEKARAN, SENGKETA)
RP. 35.3 T



PAJAK KABUPATEN/KOTA (HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN)
MENINGKAT RP. 2.7 T



PENERTIBAN FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM
RP. 3.2 T



34 DAERAH PERAIH DID UNTUK CAPAIAN INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI

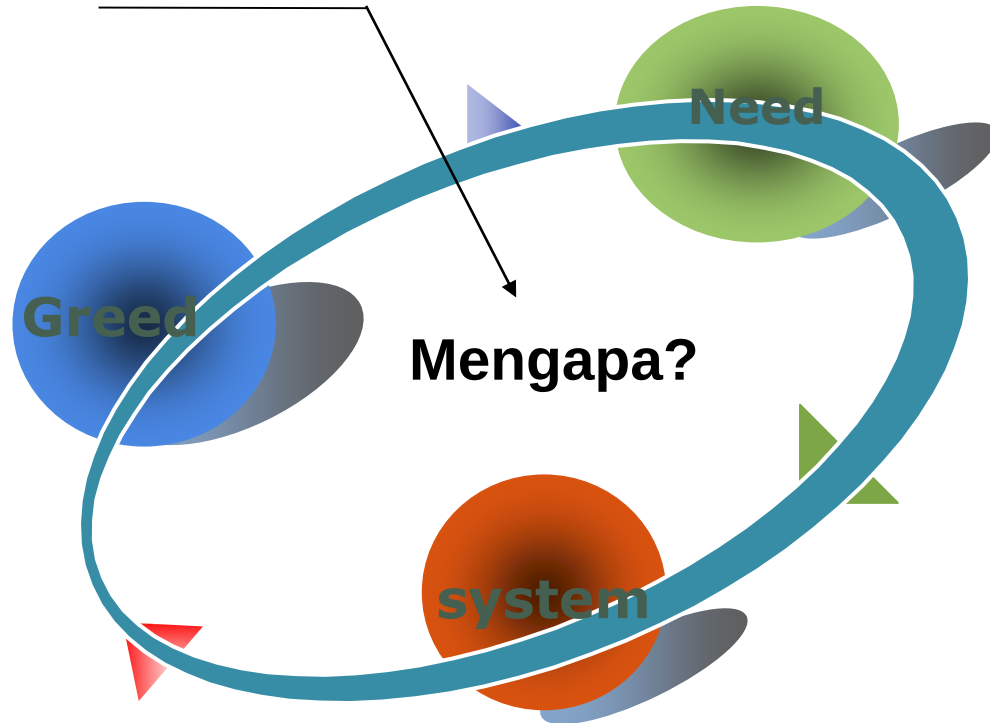
Total DID untuk kategori pencegahan korupsi sebesar Rp 316,93 miliar (2,3% dari total Pagu DID yang berjumlah 13,5T)

No	Nama Daerah	Alokasi (M)
1	Provinsi Riau	9.62
2	Provinsi Jawa Barat	8.55
3	Provinsi DI Yogyakarta	9.62
4	Provinsi Kalimantan Tengah	8.55
5	Provinsi Kalimantan Utara	9.09
6	Provinsi Sulawesi Selatan	8.55
7	Kota Bukit Tinggi	9.62
8	Kota Prabumulih	8.55
9	Kota Bandar Lampung	8.55
10	Kota Bandung	9.09
11	Kota Tangerang	8.55
12	Kota Tangerang Selatan	10.15
13	Kota Semarang	10.15
14	Kota Madiun	8.55
15	Kab. Humbang Hasundutan	9.62
16	Kab. Batang Hari	9.62
17	Kab. Musi Banyuasin	10.69

No	Nama Daerah	Alokasi (M)
18	Kab. Musi Rawas	10.69
19	Kab. Tulang Bawang	8.55
20	Kab. Bogor	8.55
21	Kab. Garut	8.55
22	Kab. Tangerang	10.15
23	Kab. Batang	9.09
24	Kab. Demak	9.62
25	Kab. Tegal	9.09
26	Kab. Lumajang	9.09
27	Kab. Mojokerto	10.15
28	Kab. Nganjuk	9.62
29	Kab. Ngawi	9.62
30	Kab. Sampang	10.15
31	Kab. Penajam Paser Utara	8.55
32	Kab. Minahasa Tenggara	9.62
33	Kab. Banggai	9.62
34	Kab. Badung	9.09

PENYEBAB KORUPSI → DAPAT DIKURANGI OLEH PARTISIPASI MASYARAKAT

KORUPSI



Corruption by Need – Terpaksa

- Dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gajinya yang rendah.
- Berhubungan dengan Niat dan Perilaku

Corruption by Greed – Memaksa

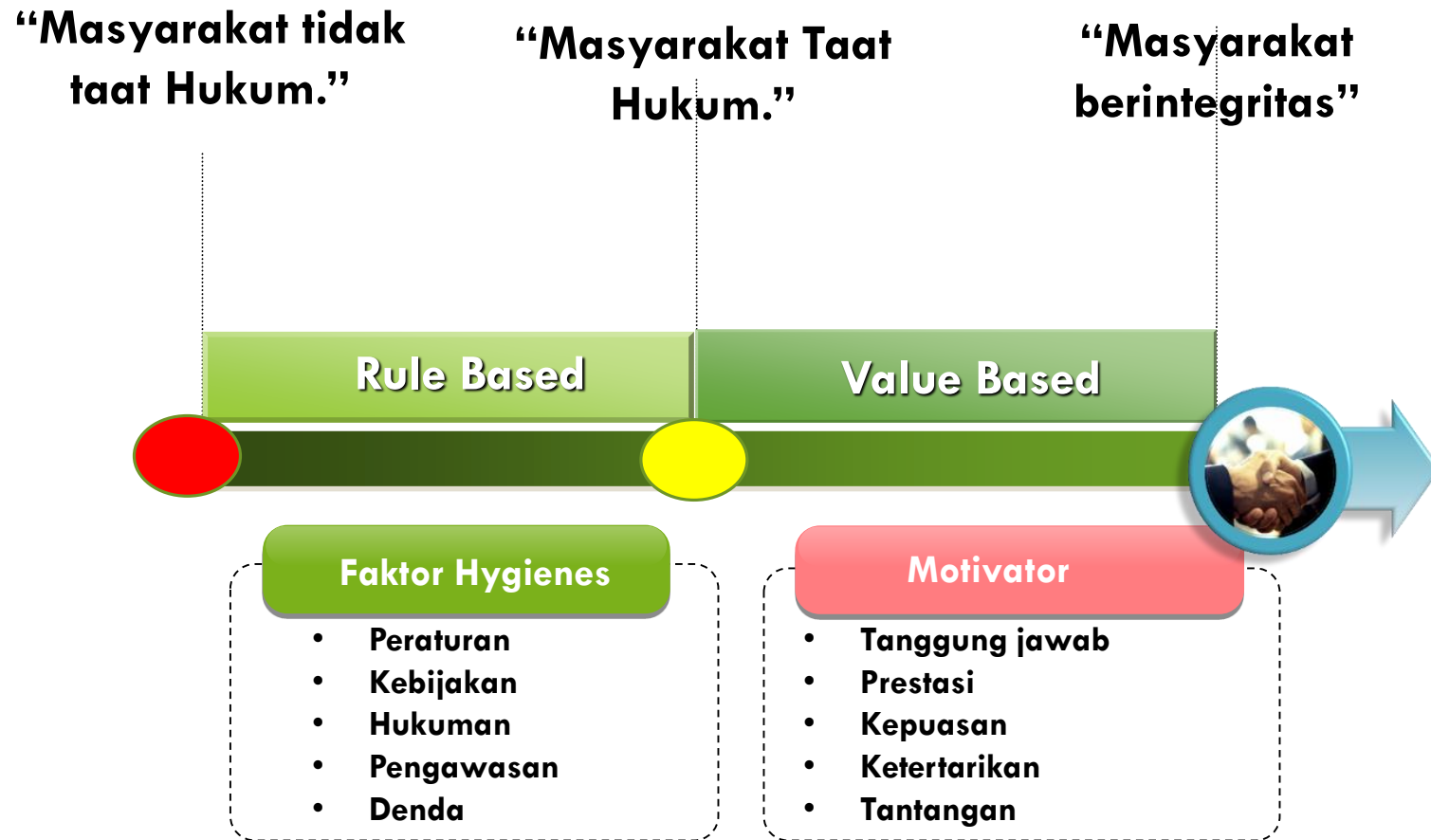
- Dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan (bermewah-mewahan).
- Berhubungan dengan Niat dan Perilaku.

Corruption by System – Dipaksa

- Korupsi: pertemuan antara niat dan kesempatan.
- Kesempatan tercipta karena kelemahan sistem dan peraturan.

Pendekatan Membangun Sistem Integritas

Menuju Masyarakat Bertanggung Jawab & Berintegritas





TERIMA KASIH

Website: www.kpk.go.id , acch.kpk.go.id

Alamat dan nomor-nomor kontak:

- Jl. Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan, 12950
- Pengaduan Masyarakat : <https://kws.kpk.go.id>
- Telepon: 021-255.78.300
- Email : informasi@kpk.go.id

Corruptissima re publica plurimae leges
(The more corrupt the state, the more numerous the laws) -Publius Cornelius Tacitus-